

KEBIJAKAN PEMBATAHAN KONSUMSI BBM BERSUBSIDI MELALUI APLIKASI MYPERTAMINA

13

Ari Mulianta Ginting

Abstrak

Kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi menjadi keharusan di tengah situasi kenaikan harga minyak bumi yang terjadi secara global dan peningkatan konsumsi BBM subsidi yang terjadi saat ini. Tanpa adanya kebijakan ini maka dikhawatirkan kuota BBM subsidi akan jebol, hanya sampai Oktober 2022. Pemerintah melalui PT Pertamina mengeluarkan kebijakan pengendalian BBM subsidi dengan sistem aplikasi MyPertamina, dimana konsumen yang ingin mengisi BBM subsidi baik solar maupun pertalite wajib mendaftarkan diri dan kendaraan melalui sistem aplikasi tersebut. Tulisan ini bertujuan mengkaji implementasi pengendalian BBM subsidi oleh pemerintah melalui PT Pertamina dengan aplikasi sistem MyPertamina. Kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi diperlukan untuk memastikan BBM subsidi diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima dan menjaga kuota subsidi BBM subsidi agar tidak jebol. DPR RI perlu memastikan agar kebijakan pembatasan BBM subsidi yang akan diterapkan benar-benar diperuntukkan bagi masyarakat yang berhak dan yang terpenting kebijakan tersebut tidak counter cyclical terhadap pertumbuhan ekonomi dan pemulihan perekonomian nasional.

Pendahuluan

Tren peningkatan harga minyak bumi diperkirakan masih akan berada di atas US\$ 100-an per barel hingga akhir tahun 2022. Sementara itu, konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi dalam negeri sangat sulit untuk ditekan. Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memprediksi kuota BBM bersubsidi baik solar maupun perlite akan habis pada bulan Oktober 2022, dengan catatan tingkat konsumsi rata-rata masyarakat pada angka 10% per

hari. Konsumsi BBM subsidi tersebut telah melebihi kuota di atas 10% setiap harinya. Jika pemerintah tidak segera melakukan pengendalian terhadap subsidi BBM maka setelah Oktober 2022 kuota BBM bersubsidi habis dan masyarakat tidak dapat mengonsumsi BBM bersubsidi baik solar maupun pertalite (Bisnis Indonesia, 29 Juni 2022).

Masalah subsidi BBM menjadi permasalahan dari tahun ke tahun yang tiada usai. Apalagi jumlah anggaran subsidi yang dikeluarkan pemerintah terus meningkat dari



tahun ke tahun. Pada tahun 2022 sebagai contoh, pemerintah telah menganggarkan dalam APBN 2022 sebesar Rp520 triliun untuk subsidi energi berupa BBM, LPG, dan listrik. Secara spesifik khusus untuk subsidi BBM dan LPG berjumlah Rp75,3 triliun. Angka ini masih ditambah kompensasi harga BBM penugasan seperti pertalite yang jumlahnya saat ini Rp293,5 triliun. Pemberian subsidi yang begitu besar kepada energi, khususnya BBM, telah terbukti memberikan tambahan beban yang sangat tinggi bagi APBN (Sindo, 1 Juli 2022).

Kebijakan pengendalian subsidi BBM dikeluarkan pemerintah per 1 Juli 2022 demi menjaga kuota subsidi BBM tidak melebihi target serta memastikan bahwa subsidi BBM diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Kebijakan pengendalian BBM subsidi tersebut diterapkan pemerintah melalui PT Pertamina melalui sistem aplikasi MyPertamina. Pemerintah mendorong pengendalian BBM subsidi agar pemberian subsidi tersebut benar-benar dinikmati oleh orang yang berhak dan menjaga sustainabilitas dari ketahanan fiskal pemerintah.

Tulisan ini bertujuan mengkaji implementasi pengendalian BBM subsidi oleh pemerintah melalui PT Pertamina dengan aplikasi sistem MyPertamina. Pengendalian konsumsi BBM subsidi menjadi keharusan bagi pemerintah agar kuota BBM subsidi bisa sampai dengan akhir tahun 2022 dan menjaga agar BBM subsidi tersebut tepat sasaran.

Urgensi Kebijakan Pengendalian BBM Subsidi

Bank Dunia dalam laporan edisi bulan Juli 2022 dengan judul *Indonesia Economic Prospects*

menegaskan bahwa peningkatan harga minyak bumi pada tahun 2021 yang hanya berkisar US\$ 70-an per barel menjadi lebih dari US \$100-an pada tahun 2022 memberikan dampak terhadap perekonomian Indonesia. Salah satu dampak tersebut adalah peningkatan anggaran subsidi BBM yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang signifikan (World Bank, 2022). Data yang berasal dari Kementerian Keuangan mencatat bahwa pemerintah menaikkan anggaran menjadi Rp520 triliun pada tahun 2022.

Direktur Utama PT Pertamina Nicke Widyawati menjelaskan bahwa selisih harga keekonomian antara BBM subsidi dengan harga pasar sangat tinggi. Sebagai contoh Nicke memaparkan solar memiliki harga keekonomian mencapai Rp13.000 per liter sementara Pertamina menjual solar pada harga Rp5.150. Sedangkan jika mengikuti harga minyak per hari ini (tanggal 6 Juli 2022) harga pasar mencapai Rp18.150 per liter. Kondisi ini berarti setiap liter solar ada subsidi yang diberikan negara sebesar Rp13.000 per liter. Kondisi yang sama untuk pertalite yang mencapai subsidi per liter sebesar Rp9.550. Jika hal ini diteruskan maka berdampak terhadap semakin meningkatnya beban subsidi yang harus ditanggung negara (detik.com, 6 Juli 2022).

Bank Dunia lebih lanjut mendorong adanya kebijakan afirmatif pengalihan anggaran belanja yang begitu besar untuk subsidi BBM kepada bantuan sosial. Hal ini dikarenakan penghematan dari anggaran subsidi BBM sebesar 1% dari Produk Domestik Bruto (PDB) dapat dialihkan untuk bantuan sosial sebesar 0,5% dari PDB sebagai bantalan ekonomi untuk rumah

tangga paling bawah (World Bank, 2022). Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan bahwa subsidi energi dan BBM sebesar Rp520 triliun tersebut tidak tepat sasaran dan lebih banyak dinikmati oleh orang kaya (Kompas, 30 Juni 2022).

Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman menegaskan bahwa konsumsi masyarakat dalam menggunakan BBM subsidi, pertalite sebagai contoh, sudah melebihi 50% sehingga sudah sangat sulit diatur dan dikendalikan. Hal tersebut disebabkan oleh adanya disparitas harga yang begitu jauh atau tinggi antara pertalite yang subsidi pemerintah dengan BBM yang non-subsidi seperti Pertamina. Hal senada juga terjadi untuk BBM subsidi solar yang memiliki disparitas harga yang sangat jauh dengan BBM non-subsidi seperti Dexlite atau DEX (Neraca, 5 Juli 2022).

Senada dengan hal tersebut, Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Patra Niagara Irto Ginting menyebutkan kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi diperlukan karena berdasarkan data yang diperoleh PT Pertamina ditemukan ketidaktepatan subsidi. Data menunjukkan bahwa BBM subsidi baik solar dan pertalite masih banyak dikonsumsi oleh golongan masyarakat menengah ke atas yang tidak berhak mendapatkan subsidi. Kurang lebih 60% teratas atau orang kaya menikmati hampir 80% dari total BBM subsidi. Sementara masyarakat miskin dan rentan atau 40% terbawah hanya dapat menikmati 20% dari BBM subsidi (Kompas, 1 Juli 2022).

Penulis berpendapat urgensi pengendalian konsumsi BBM subsidi sudah tepat dan wajib dilakukan. Disparitas harga antara BBM subsidi

dengan harga pasar dan lonjakan kenaikan konsumsi BBM subsidi dapat membuat kuota BBM subsidi dapat habis sebelum waktunya. Kondisi ini dapat berdampak terhadap jebolnya anggaran subsidi BBM yang dikeluarkan pemerintah. Padahal anggaran subsidi BBM yang begitu besar dapat dialihkan kepada sektor produktif yang dapat mendorong pertumbuhan perekonomian nasional.

Kebijakan Pengendalian BBM Subsidi

Kenaikan anggaran subsidi yang begitu besar berdampak terhadap ruang fiskal pemerintah yang semakin kecil. Kondisi ini jelas dapat menyebabkan situasi yang bahaya bagi perekonomian negara. Hal ini diperparah dengan ketidaktepatan sasaran konsumsi BBM subsidi yang dinikmati oleh orang yang tidak berhak. Berdasarkan paparan di atas, maka pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan pengendalian atau pembatasan pembelian BBM subsidi, baik solar maupun pertalite.

Kebijakan pengendalian konsumsi BBM subsidi yang dikeluarkan pemerintah dilakukan melalui PT Pertamina dengan menggunakan sistem aplikasi MyPertamina. Masyarakat yang akan menggunakan BBM bersubsidi diwajibkan mendaftarkan kendaraannya melalui situs mypertamina.id mulai tanggal 1 Juli 2022. Pendaftaran tersebut dilakukan dengan memasukkan nama, nomor telepon, kartu tanda penduduk (KTP), nomor polisi, kapasitas mesin, dan foto kendaraan. Setelah mendaftar, masyarakat akan mendapatkan kode QR yang melekat pada

kendaraan. Hasil kode QR dari aplikasi MyPertamina tersebut yang nantinya wajib ditunjukkan ketika masyarakat ingin membeli BBM subsidi seperti solar atau pertalite, dengan cara di-*scan* oleh petugas di SPBU (Kompas, 1 Juli 2022).

Kebijakan ini berlaku dan diuji coba di 11 wilayah di lima provinsi di Indonesia, antara lain di Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam, Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar, Kota Banjarmasin, Kota Bandung, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Manado, Kota Yogyakarta, dan Kota Sukabumi. Jika program ini berhasil maka akan dilakukan serentak di seluruh Indonesia. Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ego Legowo Putra menjelaskan pemilihan kota tersebut didasarkan pada hasil diskusi panjang antara PT Pertamina dengan pemerintah daerah. Mars menjelaskan eksekusi gelombang kedua kebijakan pembatasan tersebut akan diterapkan di seluruh Pulau Jawa pada 1 September 2022. Namun PT Pertamina belum akan memfinalisasi kebijakan tersebut karena Pertamina masih berfokus kepada registrasi dan verifikasi pendaftar melalui aplikasi MyPertamina (Kompas, 30 Juni 2022).

Penerapan pengendalian konsumsi BBM melalui aplikasi MyPertamina tidak lepas dari permasalahan dan kendala yang dihadapi di lapangan. Penulis mencoba mengidentifikasi beberapa kendala penerapan aplikasi MyPertamina dalam penerapan kebijakan pembatasan konsumsi BBM subsidi, antara lain: *pertama*,

sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah melalui PT Pertamina terkait program ini masih sangat rendah. Banyak masyarakat yang belum mengetahui kebijakan ini untuk mencegah kegaduhan di lapangan.

Kedua, penggunaan aplikasi MyPertamina membutuhkan syarat utama, yaitu akses internet. Tanpa adanya akses internet maka kebijakan ini tidak dapat berjalan. Kondisi prasyarat ini jelas sangat menyulitkan bagi daerah-daerah terpencil dan tidak mendapatkan jaringan internet. *Ketiga*, dibutuhkan infrastruktur di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) mulai perangkat hingga kesiapan sumber daya manusia untuk menjalankannya. Oleh karena itu menurut pandangan penulis, masih banyak beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki sebelum kebijakan pembatasan BBM subsidi diterapkan di seluruh Indonesia.

Lebih lanjut pakar ekonomi energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi menyebutkan kebijakan kewajiban penggunaan aplikasi MyPertamina untuk membeli BBM subsidi, baik pertalite dan solar tidak akan efektif. Hal ini dikarenakan masyarakat bawah yang menjadi sasaran BBM subsidi banyak yang tidak memiliki *gadget* dan tidak ada akses internet yang menjadi prasyarat utama bagi penerapan kebijakan aplikasi MyPertamina. Kondisi dan fakta di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua masyarakat yang berpenghasilan rendah memiliki *gadget* atau akses internet yang memadai (tempo.co, 29 Juni 2022).

Senada dengan pandangan di atas, Direktur *Center of*

Economic and Law Studies Bhima Yudhistira memandang terdapat celah penyimpangan pendataan ataupun penyaluran subsidi melalui MyPertamina yang berbasis kendaraan. Data kendaraan yang dimiliki masyarakat, misalnya mobil bekas, dibeli cenderung tanpa balik nama sehingga muncul ketidaktepatan data. Menurut Bhima Yudhistira kebijakan pengendalian BBM subsidi lebih tepat jika menggunakan data yang sudah ada seperti Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dimiliki oleh Kementerian Sosial. Penerapan penerima BBM subsidi berdasarkan data DTKS akan lebih memastikan bahwa BBM subsidi tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan (Kompas, 5 Juli 2022).

Rencana pengendalian dan pembatasan BBM subsidi, baik solar dan pertalite melalui MyPertamina menjadi terobosan baru di tengah situasi harga minyak dunia di atas US \$100 dan lonjakan konsumsi BBM subsidi. Namun masih banyak catatan yang harus diperbaiki dan diperhatikan dalam proses penerapan di seluruh Indonesia. DPR RI khususnya komisi terkait, yaitu Komisi VI dan Komisi VII harus bergerak cepat untuk melakukan telaah dan evaluasi terhadap penerapan kebijakan tersebut. DPR RI, baik Komisi VI maupun Komisi VII perlu memanggil *stakeholder* terkait penerapan aplikasi MyPertamina sebagai alat untuk mengendalikan konsumsi BBM subsidi. Penulis berpandangan bahwa DPR RI perlu mendapatkan kepastian dari PT Pertamina terkait kesiapan teknis di lapangan dan kesiapan masyarakat dalam menggunakan aplikasi MyPertamina tersebut.

Penutup

Peningkatan harga minyak bumi diperkirakan masih akan berada di atas US\$100-an selama tahun 2022. Peningkatan harga minyak bumi tersebut ditambah dengan peningkatan lonjakan konsumsi dapat berdampak terhadap risiko jebolnya kuota BBM subsidi yang telah ditetapkan pemerintah untuk tahun 2022. Kebijakan pengendalian BBM subsidi yang diterapkan pemerintah melalui PT Pertamina adalah dengan sistem aplikasi MyPertamina. Implementasi penerapan sistem aplikasi MyPertamina masih pada tahapan uji coba pendaftaran di 11 kota di 5 provinsi di Indonesia dan dilakukan mulai 1 Juli 2022. Uji coba dilakukan sebelum digulirkan ke seluruh Pulau Jawa per tanggal 1 September 2022 pendaftaran masyarakat yang ingin mengonsumsi BBM subsidi.

DPR RI melalui komisi terkait harus memastikan bahwa penerapan kebijakan pembatasan BBM subsidi melalui aplikasi MyPertamina penyalurannya tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Hal yang juga penting adalah memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak menjadi *counter cyclical* terhadap perekonomian. Perekonomian Indonesia yang hingga saat ini menunjukkan adanya pertumbuhan dan pemulihan. Namun pemulihan dan pertumbuhan tersebut masih sangat *fragile* terhadap *shock* yang muncul dan mengganggu perekonomian. DPR RI harus memastikan bahwa penerapan kebijakan tersebut justru tidak menjadi kebijakan yang *counter cyclical* terhadap agenda pemulihan ekonomi nasional.

Referensi

- "Alasan Pertamina Berlakukan Sistem Beli Peralite Pakai MyPertamina di 11 Daerah", 29 Juni 2022, <https://bisnis.tempo.co/read/1606988/alasan-pertamina-berlakukan-sistem-beli-pertalite-pakai-mypertamina-di-11-daerah>, diakses 6 Juli 2022.
- "Bahan Bakar Minyak: Pengaturan Konsumen Peralite lewat Perpres", *Kompas*, 30 Juni 2022, hal. 10.
- "Dering Alarm Lonjakan Konsumsi BBM Subsidi Kian Nyaring", 29 Juni 2022, <https://bisnisindonesia.id/article/dering-alarm-lonjakan-konsumsi-bbm-subsidi-kian-nyaring>, diakses 6 Juli 2022.
- "Hentikan Kegaduhan Subsidi", *Kompas*, 5 Juli 2022, hal. 9.
- "Mendukung Pembatasan Pembelian Peralite", *Neraca*, 5 Juli 2022, hal. 2.
- "Pantas Subsidi Bengkak! Peralite Harusnya Rp17.200 Dijual Rp7.650", 6 Juli 2022, <https://finance.detik.com/energi/d-6164864/pantas-subsidi-bengkak-pertalite-harusnya-rp-17200-dijual-rp-7650>. diakses 6 Juli 2022.
- "Pembatasan BBM Subsidi lewat MyPertamina", 1 Juli 2022, <https://nasional.sindonews.com/read/814471/16/pembatasan-bbm-subsidi-lewat-mypertamina-1656662870>, diakses 6 Juli 2022.
- "Pengaturan Peralite Cegah Subsidi Jebol", *Kompas*, 1 Juli 2022, hal. 9.
- World Bank. 2022. *Indonesia Economic Prospects (IEP), June 2022: Financial Deepening for Stronger Growth and Sustainable Recovery*. World Bank Report. New York: World Bank.



Ari Mulianta Ginting
art.ginting@dpr.go.id

Dr. Ari Mulianta Ginting, S.E., M.S.E., menyelesaikan pendidikan S1 Manajemen Keuangan Universitas Indonesia (2006), S2 Ilmu Ekonomi Universitas Indonesia (2008), dan menyelesaikan program doktoral (S3) Ilmu Ekonomi konsentrasi *Pubic Policy* Universitas Trisakti (2020). Karya tulis ilmiah yang pernah diterbitkan antara lain: "Analisis Pengaruh Korupsi terhadap Kemiskinan di Indonesia", Pengaruh Perkembangan Kredit Perbankan terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia", "Pengaruh Ketimpangan Pembangunan antarwilayah terhadap Kemiskinan di Indonesia 2004-2013", "The Impact of Financia and Competition Conglomeration Policies on Banking Efficiency and Risk in Indonesia", dan "The Impact of Fiscal Decentralization on Economic Growth in Indonesia".

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.